

IMPLEMENTASI KERJASAMA INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM MENANGGULANGI TRANSAKSI ILEGAL DI PERBATASAN KALIMANTAN BARAT 2019 – 2024

Yehezkiel Mourenthino T¹, Farid Ramadhony²

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional
Universitas 17 Agustus 1945

Correspondence

E-mail: yeskielanakorang@gmail.com

No. Telp:

Submitted 3 September 2024

Accepted 8 September 2024

Published 13 September 2024

ABSTRAK

Indonesia dan Malaysia memiliki hubungan diplomatik yang erat dan telah menjalin berbagai bentuk kerjasama, khususnya dalam menangani transaksi ilegal di perbatasan Kalimantan Barat. Permasalahan ini terutama terkait dengan jalur darat yang menjadi titik rawan aktivitas ilegal antara kedua negara. Sejak pengakuan Indonesia atas kemerdekaan Malaysia, kedua negara telah memperluas kerjasama mereka, termasuk di bidang pertahanan dan keamanan. Fokus utama kerjasama ini adalah menangani perdagangan manusia (human trafficking) dan peredaran serta penyelundupan narkoba, yang menjadi ancaman serius bagi keamanan nasional kedua negara. Upaya bersama ini mencakup patroli perbatasan, pertukaran intelijen, serta peningkatan koordinasi antara aparat penegak hukum kedua negara. Dengan memperkuat kerjasama ini, Indonesia dan Malaysia berupaya untuk menjaga stabilitas kawasan perbatasan dan melindungi masyarakat dari dampak negatif kejahatan transnasional.

Kata Kunci: Kerjasama, Keamanan, Indonesia, Malaysia, Transaksi Ilegal.

ABSTRACT

Indonesia and Malaysia have a close diplomatic relationship and have established various forms of cooperation, particularly in addressing illegal transactions along the West Kalimantan border. This issue is primarily related to land routes that have become hotspots for illegal activities between the two countries. Since Indonesia's recognition of Malaysia's independence, the two nations have expanded their cooperation, including in the fields of defense and security. The main focus of this cooperation is to tackle human trafficking and the distribution and smuggling of narcotics, which pose serious threats to the national security of both countries. Joint efforts include border patrols, intelligence exchanges, and increased coordination between law enforcement agencies from both nations. By strengthening this cooperation, Indonesia and Malaysia aim to maintain stability in the border region and protect their populations from the negative impacts of transnational crime.

Keywords: Cooperation, Security, Indonesia, Malaysia, Illegal transactions

A. PENDAHULUAN

Keamanan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, khususnya di Kalimantan Barat, tetap menjadi isu strategis yang kompleks. Wilayah ini mengalami masalah serius seperti perdagangan manusia dan penyelundupan narkoba. (Niko & Thea Purnama, 2020) Perdagangan manusia di perbatasan Kalimantan Barat sering kali melibatkan perempuan dan anak-anak yang dieksploitasi sebagai pekerja seks komersial atau buruh tanpa upah. Faktor-faktor seperti rendahnya tingkat pendidikan, minimnya lapangan pekerjaan, dan kondisi ekonomi yang sulit mendorong individu dan keluarga untuk mencari penghidupan alternatif, sering kali tanpa menyadari risiko yang terlibat. (Emanuel Edi Saputra, 2024)

Sementara itu, penyelundupan narkoba juga menjadi ancaman serius. Berbagai jenis narkoba, termasuk sabu-sabu dan heroin, sering diselundupkan melalui jalur darat yang sulit diawasi secara ketat. Penyelundup memanfaatkan celah-celah di sepanjang perbatasan yang tidak terjaga untuk mengangkut narkoba ke dalam maupun keluar kedua negara. Kondisi geografis yang sulit dijangkau serta kurangnya patroli perbatasan yang efektif memperburuk situasi ini. (Priangani & Nurindah, 2020)

Untuk menangani masalah ini, kerjasama antara Indonesia dan Malaysia sangat penting. Kedua negara telah menjalin hubungan diplomatik yang erat dan berkomitmen untuk menjaga

perdamaian, keamanan, dan stabilitas di sepanjang perbatasan. (Priangani & Nurindah, 2020) Bentuk kerjasama ini meliputi patroli bersama, pertukaran informasi intelijen, serta program rehabilitasi bagi korban perdagangan manusia dan penyalahgunaan narkoba.

Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan untuk menangani isu ini, seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Malaysia juga memiliki peraturan ketat terkait kedua isu ini. Namun, perbedaan sistem hukum, tingkat korupsi, dan kompleksitas geografis tetap menjadi tantangan besar dalam penegakan hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kerjasama bilateral yang telah dilakukan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan manusia dan penyelundupan narkoba. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk meningkatkan keamanan di wilayah perbatasan ini. Selain itu, situasi keamanan juga dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi dan budaya masyarakat setempat, yang sering kali dimanfaatkan oleh sindikat kejahatan untuk menjalankan aktivitas ilegal mereka. Kerjasama Indonesia dan Malaysia dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk mengatasi masalah ini. Salah satu inisiatif penting adalah pembentukan General Border Committee (GBC) yang menjadi platform utama untuk membahas isu-isu perbatasan. Dalam forum ini, kedua negara berbagi informasi intelijen, melakukan operasi bersama, dan menyusun strategi untuk memperkuat pengawasan di wilayah perbatasan.

Kerjasama antara Indonesia dan Malaysia dalam menanggulangi transaksi ilegal di perbatasan Kalimantan Barat merupakan langkah strategis yang sangat penting bagi kedua negara. Perbatasan antara Kalimantan Barat, Indonesia, dan wilayah Sarawak, Malaysia, sering kali menjadi titik rawan bagi berbagai kegiatan ilegal, seperti penyelundupan barang, perdagangan narkoba, serta perdagangan manusia. Oleh karena itu, kolaborasi yang erat antara kedua negara ini diperlukan guna menjaga stabilitas keamanan di kawasan perbatasan serta melindungi integritas hukum dan ekonomi masing-masing negara. Indonesia dan Malaysia berbagi garis perbatasan sepanjang lebih dari 2.000 kilometer di pulau Kalimantan, yang sebagian besar berada di wilayah yang sulit dijangkau dan berpenduduk jarang. Kondisi geografis ini memberikan tantangan tersendiri bagi penegakan hukum, karena celah dalam pengawasan sering kali dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan untuk melakukan aktivitas ilegal. Di sisi lain, banyaknya jalur tikus (jalur ilegal) yang memotong perbatasan memperumit upaya pengawasan. Hal ini mendorong pemerintah kedua negara untuk meningkatkan kerjasama dalam berbagai aspek, seperti pengawasan perbatasan, pertukaran informasi intelijen, serta patroli bersama.

Salah satu bentuk nyata dari kerjasama ini adalah pembentukan tim gabungan patroli perbatasan. Patroli ini tidak hanya melibatkan aparat keamanan dari TNI dan Polri di pihak Indonesia, tetapi juga melibatkan Tentara Darat Malaysia serta pihak kepolisian Malaysia. Operasi gabungan ini bertujuan untuk menekan angka transaksi ilegal yang sering terjadi, baik itu berupa penyelundupan barang-barang seperti rokok, alkohol, maupun produk elektronik yang masuk atau keluar tanpa melalui jalur resmi. Dengan adanya patroli bersama, pengawasan terhadap aktivitas ilegal di perbatasan diharapkan bisa lebih efektif. Selain patroli, kerjasama Indonesia dan Malaysia juga mencakup pertukaran informasi intelijen yang lebih intensif. Kedua negara menyadari bahwa informasi yang akurat dan terkini merupakan kunci dalam menindaklanjuti jaringan kejahatan lintas negara. Dengan berbagi data terkait aktivitas mencurigakan dan jaringan kriminal, kedua negara dapat merespons dengan lebih cepat dan tepat dalam membongkar sindikat penyelundupan maupun perdagangan ilegal yang beroperasi di wilayah perbatasan.

Tantangan yang dihadapi dalam penanggulangan transaksi ilegal ini tidak hanya berasal dari pelaku kejahatan, tetapi juga dari masyarakat lokal yang terkadang terlibat dalam aktivitas

ilegal karena faktor ekonomi. Keterbatasan lapangan kerja dan kemiskinan di kawasan perbatasan menjadi salah satu penyebab mengapa masyarakat setempat terlibat dalam penyelundupan. Oleh karena itu, selain melakukan penindakan hukum, pemerintah Indonesia dan Malaysia juga berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan melalui berbagai program pembangunan ekonomi dan sosial. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri dan lembaga terkait, telah berulang kali melakukan diplomasi dengan pihak Malaysia untuk memperkuat kerjasama bilateral dalam menangani isu-isu di perbatasan. Salah satu hasil diplomasi tersebut adalah penandatanganan nota kesepahaman (MoU) mengenai penguatan kerjasama keamanan di wilayah perbatasan. MoU ini mencakup komitmen kedua negara untuk meningkatkan kapasitas infrastruktur keamanan, termasuk pengadaan peralatan pemantauan canggih serta penambahan personel di pos-pos perbatasan.

Kerjasama di bidang teknologi juga menjadi salah satu aspek penting dalam penanggulangan transaksi ilegal. Indonesia dan Malaysia telah memulai penggunaan teknologi pemantauan seperti drone, CCTV, dan alat pemindai untuk memperketat pengawasan di perbatasan. Teknologi ini memungkinkan deteksi dini terhadap aktivitas mencurigakan, sehingga aparat keamanan dapat bertindak dengan lebih cepat dan efektif. Dengan demikian, celah bagi pelaku kejahatan untuk beroperasi dapat diminimalisir. Di sisi lain, kedua negara juga aktif dalam forum-forum regional seperti ASEAN dan APEC untuk menggallang dukungan dan memperluas kerjasama lintas negara dalam memerangi kejahatan lintas batas. Melalui forum-forum ini, Indonesia dan Malaysia bersama negara-negara anggota lainnya dapat bertukar pengalaman dan praktik terbaik dalam mengatasi masalah di perbatasan, sehingga dapat memperkuat sistem pengawasan serta koordinasi regional.

Meski begitu, masih terdapat tantangan besar yang harus dihadapi oleh kedua negara. Salah satunya adalah keterbatasan infrastruktur di kawasan perbatasan yang sulit dijangkau. Pos-pos perbatasan yang tersebar di hutan belantara serta minimnya akses transportasi menjadi kendala bagi aparat keamanan untuk bergerak dengan cepat. Dalam hal ini, Indonesia dan Malaysia terus berupaya memperbaiki infrastruktur di kawasan perbatasan guna meningkatkan efektivitas pengawasan. Secara keseluruhan, kerjasama antara Indonesia dan Malaysia dalam menanggulangi transaksi ilegal di perbatasan Kalimantan Barat merupakan contoh konkrit dari upaya kedua negara dalam menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah masing-masing. Dengan sinergi yang semakin kuat, diharapkan aktivitas ilegal di kawasan perbatasan dapat ditekan, sehingga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat di perbatasan dapat terwujud.

Kerjasama antara Indonesia dan Malaysia dalam menanggulangi transaksi ilegal di perbatasan Kalimantan Barat juga mencakup upaya-upaya untuk meningkatkan koordinasi lintas batas. Koordinasi ini tidak hanya terbatas pada tingkat nasional antara aparat keamanan kedua negara, tetapi juga melibatkan pihak lokal, seperti pemerintah daerah, serta komunitas masyarakat sipil di kedua sisi perbatasan. Partisipasi aktif dari semua pihak ini sangat penting untuk memastikan bahwa upaya penanggulangan transaksi ilegal tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang. Selain itu, pendekatan pencegahan juga menjadi fokus utama dalam kerjasama ini. Pemerintah Indonesia dan Malaysia sadar bahwa upaya pencegahan merupakan langkah yang lebih baik dan lebih efisien daripada penindakan setelah terjadi kejahatan. Oleh karena itu, program-program pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat lokal tentang bahaya dan konsekuensi dari terlibat dalam transaksi ilegal terus ditingkatkan. Pendekatan ini tidak hanya mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan perbatasan, tetapi juga membantu mengurangi daya tarik terhadap aktivitas ilegal di kawasan tersebut.

Dalam aspek hukum, kedua negara juga telah melakukan harmonisasi dalam beberapa aturan hukum yang berkaitan dengan penanggulangan transaksi ilegal di perbatasan. Langkah ini bertujuan untuk mempermudah proses penegakan hukum lintas batas, termasuk ekstradisi pelaku kejahatan lintas negara dan penanganan kasus-kasus perdagangan ilegal yang melintasi

perbatasan. Dengan adanya kerangka hukum yang lebih solid dan terintegrasi, diharapkan penanganan kasus-kasus transaksi ilegal dapat berjalan lebih efektif dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Aspek terakhir yang tidak kalah penting adalah dukungan dari masyarakat internasional dan organisasi lintas negara dalam upaya menanggulangi transaksi ilegal di perbatasan Kalimantan Barat. Indonesia dan Malaysia aktif menggalang dukungan dari negara-negara lain, seperti melalui forum-forum regional ASEAN dan APEC, serta melalui kerjasama dengan Interpol dan organisasi internasional lainnya. Dukungan ini tidak hanya berupa teknologi dan sumber daya, tetapi juga berupa pertukaran informasi dan kebijakan terbaik dalam penanganan kejahatan lintas batas. Namun demikian, tantangan tetap ada dan kerjasama ini harus terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Perubahan dinamika sosial-ekonomi, perkembangan teknologi, serta adaptasi pelaku kejahatan terhadap upaya penanggulangan adalah faktor-faktor yang harus terus dipantau dan direspons dengan cepat. Peningkatan kapasitas aparat keamanan, pengembangan teknologi pemantauan yang lebih canggih, serta peningkatan kerjasama lintas sektor dan lintas negara menjadi kunci dalam menjaga keberhasilan kerjasama antara Indonesia dan Malaysia dalam menanggulangi transaksi ilegal di perbatasan Kalimantan Barat. Dengan kesadaran akan pentingnya kerjasama lintas batas ini, Indonesia dan Malaysia tidak hanya berupaya melindungi kedaulatan wilayahnya, tetapi juga mengedepankan kepentingan bersama dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan. Kerjasama yang semakin erat dan terstruktur dengan baik diharapkan tidak hanya mampu mengatasi tantangan saat ini, tetapi juga menyiapkan dasar yang lebih kuat untuk menghadapi berbagai ancaman keamanan di masa depan.

Dalam kerjasama internasional, terutama antara dua negara yang berbatasan langsung seperti Indonesia dan Malaysia, semangat toleransi dan saling menghormati menjadi landasan penting dalam menjaga hubungan yang harmonis. Kedua negara ini menghadapi berbagai tantangan lintas batas, termasuk transaksi ilegal yang sering terjadi di perbatasan Kalimantan Barat. Seperti yang ditegaskan dalam berbagai mazhab teologi Islam, perbedaan pandangan seharusnya tidak menjadi penghalang dalam membangun ukhuwah dan kerjasama. Prinsip ini relevan dalam konteks hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia, di mana dialog yang terbuka dan saling menghargai menjadi kunci untuk mencapai kesepakatan dan solusi bersama dalam mengatasi masalah kejahatan lintas negara. (Khoirunnisa Khoirunnisa, 2023)

Kerjasama antara Indonesia dan Malaysia dalam menanggulangi transaksi ilegal di perbatasan Kalimantan Barat membutuhkan pendekatan yang mengedepankan komunikasi intensif dan koordinasi antar-lembaga. Isu transaksi ilegal, yang meliputi penyelundupan barang, perdagangan manusia, dan narkoba, merupakan ancaman serius bagi keamanan kedua negara. Oleh karena itu, kerjasama yang didasari oleh saling menghormati dan sikap terbuka akan memungkinkan kedua negara untuk saling berbagi informasi, strategi, dan sumber daya guna memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perbatasan. Dengan adanya koordinasi yang baik, kedua negara dapat mengurangi friksi yang mungkin timbul akibat perbedaan kebijakan, sekaligus meningkatkan efektivitas tindakan dalam mengatasi kejahatan lintas batas. (Khoirunnisa Khoirunnisa, 2023)

Selain itu, pentingnya menerapkan prinsip toleransi dan saling menghormati dalam kerjasama bilateral ini juga tercermin dalam kebutuhan untuk menyelaraskan kebijakan nasional masing-masing negara. Meski Indonesia dan Malaysia memiliki sistem hukum dan kebijakan yang berbeda, pendekatan yang saling menghargai dapat membantu menciptakan solusi yang efektif dan disepakati bersama. Kesuksesan kerjasama ini tidak hanya tergantung pada tindakan penegakan hukum yang kuat, tetapi juga pada dialog dan pengertian antar kedua negara dalam menangani masalah yang muncul. Dengan demikian, semangat kerjasama yang didasarkan pada toleransi dapat menjadi kunci dalam menciptakan perbatasan yang aman dan tertib, serta mendorong stabilitas regional yang lebih baik. (Khoirunnisa Khoirunnisa, 2023)

B. METODOLOGI

Proses kegiatan yang memiliki tujuan untuk menjawab suatu permasalahan dengan berpikir kritis, teliti dalam mencari fakta dan data menggunakan Langkah-langkah secara ilmiah itulah yang disebut penelitian. Dalam penelitian, keinginan untuk benar-benar mengetahui sudut pandang yang kita yakini untuk menemukan jawaban atas suatu masalah. Penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menemukan hasil penelitian ini. Dalam penelitian dibidang sosial metode kualitatif banyak digunakan oleh peneliti. Tahapan yang dilakukan kualitatif pertama dimlai mencari suatu permasalahan yang terjadi, lalu mengemukakan hipotesis sementara untuk dapat memberikan gambaran bagaimana menjawab permasalahan yang diteliti, sertakan data-data penunjang dan menganalisa dari setiap data dan memberikan simpulan yang menjawab setiap dari permasalahan tersebut.

Tahapan selanjutnya adalah menguraikan dan mengidentifikasi masalah, beri Batasan-batasan masalah yanag akan diteliti agar tidak bias dalam penelitiannya. Penelitian ini berfokus pada deskripsi dan interpretasi kasus dan mengarahkan pada konsep dan teori. Setelah mengetahui fokus penelitian pada bagian akhir, penulis akan membuat kesimpulan sebagai jawaban atas masalah yang ditimbulkan oleh penelitian ini. Penulis akan melakukan pengumpulan data terkait dalam menanggulangi transaksi ilegal di perbatasan Kalimantan barat, data yang dikumpulkan akan membantu penulis dalam menjawab hipotesis dari permasalahan yang ada.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN**Gambaran Umum Wilayah Kalimantan Barat**

Wilayah perbatasan antara Kalimantan Barat, Indonesia, dan Sarawak, Malaysia, merupakan area yang memiliki karakteristik geografis dan sosial ekonomi yang unik dan kompleks. Perbatasan ini memanjang sepanjang lebih dari 2.000 kilometer, membentang dari utara hingga selatan Kalimantan Barat, dan mencakup berbagai bentuk topografi seperti pegunungan, hutan lebat, sungai-sungai besar, serta daerah pedalaman yang sulit dijangkau.



Gambar 1 Peta Pulau Kalimantan

Secara geografis, wilayah perbatasan ini terdiri dari kawasan hutan tropis yang lebat, yang menjadi habitat bagi banyak spesies flora dan fauna endemik. Keadaan geografis yang sulit dijangkau ini sering kali dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan transnasional untuk melakukan berbagai aktivitas ilegal seperti perdagangan manusia dan penyelundupan narkoba. Akses yang terbatas dan pengawasan yang sulit menjadi tantangan utama dalam mengamankan wilayah perbatasan ini.

Di sisi sosial ekonomi, masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan sering kali hidup dalam kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan. Banyak dari mereka bekerja di sektor informal dengan penghasilan yang tidak menentu. Pendidikan dan layanan kesehatan di wilayah ini juga masih terbatas, yang berdampak pada rendahnya tingkat literasi dan kesehatan masyarakat. Situasi ini membuat mereka rentan terhadap eksploitasi dan menjadi target mudah bagi sindikat kejahatan.

Secara budaya, masyarakat perbatasan Kalimantan Barat dan Sarawak memiliki hubungan kekerabatan dan budaya yang erat. Banyak di antara mereka berasal dari suku Dayak yang mendiami kedua sisi perbatasan. Hubungan kekerabatan ini menciptakan mobilitas yang tinggi antar masyarakat di kedua negara, yang sering kali dilakukan melalui jalur-jalur tradisional yang tidak resmi. Jalur-jalur ini, meskipun memudahkan hubungan sosial dan ekonomi, juga sering dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal.

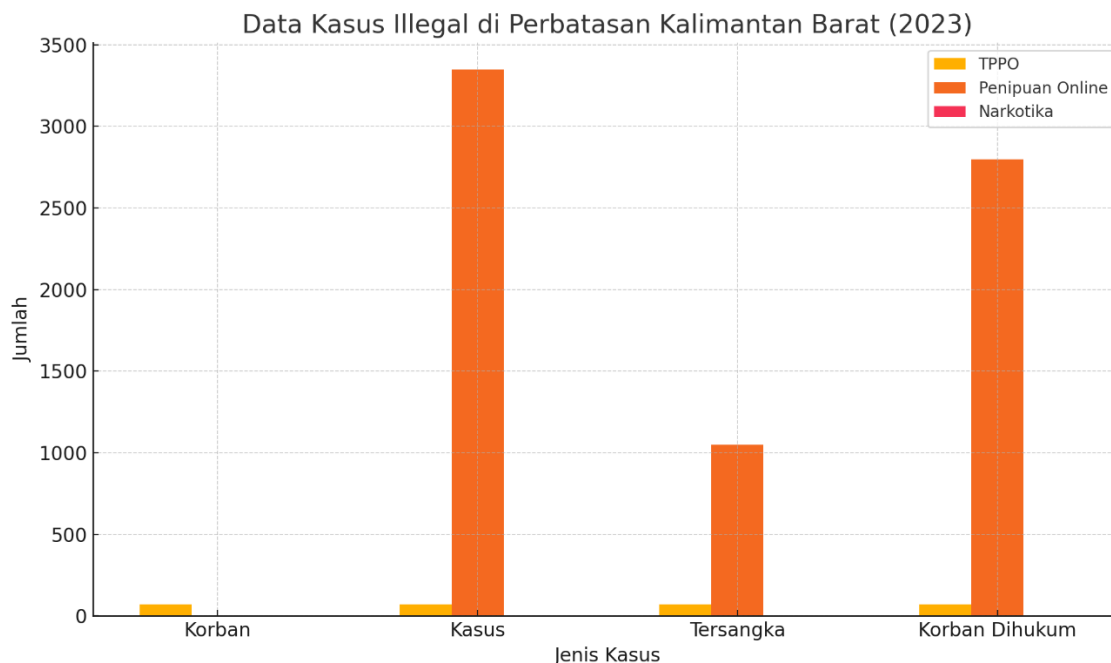
Upaya penanganan masalah keamanan di wilayah perbatasan ini tidak bisa dilepaskan dari pentingnya kerjasama bilateral antara Indonesia dan Malaysia. Kedua negara telah menyadari pentingnya koordinasi yang baik dalam mengatasi tantangan ini. Berbagai inisiatif seperti patroli bersama, pertukaran informasi intelijen, dan program-program pengembangan ekonomi kawasan perbatasan telah dilakukan untuk meningkatkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat di perbatasan.

Faktor-faktor pendorong transaksi ilegal dikawasan Kalimantan Barat

Faktor-faktor yang mendorong peningkatan jumlah perdagangan orang, yang merupakan salah satu transaksi ilegal yang terjadi di perbatasan Kalimantan Barat Perdagangan ilegal adalah perdagangan yang dilakukan tanpa mengikuti peraturan resmi, yang mencakup:

- a. Adanya judi On line Scam
- b. Penempatan pekerja migran Indonesia yang non procedural

Transaksi ilegal yang terjadi di perbatasan Kalimantan Barat, muncul akibat adanya aktivitas perdagangan yang tidak melalui prosedur yang seharusnya dilakukan. Menurut data yang dikumpulkan dari "Antara" pada 20 November 2023, kasus perdagangan orang telah masuk ke tahap darurat, dengan 70 korban TPPO. Kalimantan Barat menjadi penyumbang terbesar ketiga korban TPPO, hanya di belakang Sumatera Utara dan Sulawesi Utara. Berdasarkan data, hingga Oktober 2023, tercatat 3.347 kasus penipuan online, dengan 935 kasus penindakan, termasuk 1.049 tersangka dan 2.797 korban yang menerima hukuman. Kami menemukan dalam UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan TPPO bahwa penempatan pekerja migran Indonesia yang tidak melakukan prosedur adalah penyebab utama kasus TPPO. Karena banyak orang tidak merasa menjadi korban, masalah ini sulit untuk diselesaikan. Korban suka menjadi korban, dan masyarakat, terutama remaja, lebih percaya pada situs media sosial. Bahkan kasus penjualan organ tubuh seperti ginjal telah meningkat, seperti yang dilaporkan oleh Kementerian Luar Negeri dan media massa langsung ke Kemenkopolhukam. Faktor pendorong meningkatnya pengedaran dan penyeludupan narkotika. Mengedar dalam hal ini pengedaran narkoba melibatkan banyak hal, mulai dari pemasok atau distributor, kemudian ke penjual, dan lanjut ke pemakai. Pengedar narkotika berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengeksport dan mengimpor Narkotika / Psikotropika sebagaimana rumusan pasal 114 Undang Undang Nomor 35 Tentang Narkotika yang secara tegas menguraikan beberapa perbuatan mulai dari mengimpor, mengeksport, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan narkotika, yang jika dilakukan tanpa pengendalian dan pengawasan dari pihak yang berwajib.



Grafik 1: Data Kasus Ilegal di Kalimantan 2023

Narkotika dibagi menjadi 3 bagian yang sangat berbahaya apabila di konsumsi. Yaitu :

1. Narkotika Golongan I : opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamina, dan tanaman Ganja.
2. Narkotika Golongan II : ekgonina, morfin, metobromida, dan morfina.
3. Narkotika Golongan III : etilmorfina, kodeina, polkodina, dan propiram

Dan semua jenis itu tidak dapat dikonsumsi secara umum, karena bisa mengakibatkan kerusakan pada jaringan otak manusia. Terkait dengan kejahatan dalam lingkup narkotika, yang juga merupakan suatu kategori kejahatan dengan predikat luar biasa serta juga merupakan kejahatan yang tersistem, mempunyai organisasi secara luas, yakni meliputi lintas negara, kawasan, bahkan internasional sehingga hal itu bisa secara serius memberi ancaman kepada kehidupan yang ada pada suatu bangsa. Yang melatarbelakangi penyeludupan dan peredaran narkoba di Indonesia, ada berbagai macam. Macam tersebut kurang lebih mencakup empat hal, yakni pertama kelemahan dari sistem pemerintah yang tidak juga dilakukan pembenahan, kedua penegakkan hukum yang terkesan seadanya dan juga sangat lemah, ketiga lestarinya budaya dari korupsi, dan keempat adalah menurunnya nilai yang terkait dengan dua hal, yakni satu moralitas dan kedua adalah keimanan. Maka tak heran, dengan kondisi yang sedemikian sulit, ancaman besar terhadap penyalahgunaan narkoba sangat sulit dilakukan penghindaran.

Pembahasan Jenis – Jenis Kejahatan Transnasional di Kal-Bar

Kejahatan transnasional adalah kejahatan yang melintasi batas-batas negara dan melibatkan lebih dari satu negara baik dalam pelaksanaan, dampak, maupun dalam penanganannya. Di Kalimantan Barat (Kalbar), yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Malaysia, kejahatan transnasional menjadi isu penting karena wilayah ini menjadi pintu gerbang perdagangan dan migrasi antar negara. Jenis-jenis kejahatan transnasional yang terjadi di Kalbar beragam dan mencerminkan kondisi geografis serta dinamika sosial ekonomi di wilayah ini. Salah satu kejahatan transnasional yang marak terjadi di Kalimantan Barat adalah penyelundupan barang ilegal. Barang-barang yang sering diselundupkan antara lain komoditas pertanian, barang elektronik, rokok tanpa cukai, dan bahan bakar minyak. Keberadaan jalur perbatasan darat yang panjang dan sulit diawasi menjadi celah bagi para pelaku kejahatan untuk menyelundupkan barang-barang tersebut ke Indonesia

tanpa melewati jalur resmi, sehingga merugikan negara dari segi penerimaan pajak dan mengancam keberlanjutan ekonomi lokal.

Selain penyelundupan barang, perdagangan manusia juga menjadi masalah besar di Kalbar. Banyak pekerja migran, terutama dari desa-desa terpencil, menjadi korban perdagangan manusia dengan modus dijanjikan pekerjaan yang baik di negara tetangga. Namun, pada kenyataannya, mereka sering kali dieksploitasi di sektor-sektor pekerjaan informal dengan kondisi yang tidak manusiawi. Dalam banyak kasus, korban-korban perdagangan manusia ini tidak memiliki dokumen resmi sehingga mempersulit upaya perlindungan hukum bagi mereka. Kejahatan terkait dengan narkoba juga merupakan ancaman serius di wilayah perbatasan Kalimantan Barat. Jalur perbatasan darat yang relatif mudah ditembus dimanfaatkan oleh jaringan penyelundup narkoba internasional untuk mengedarkan obat-obatan terlarang, terutama sabu-sabu dan ekstasi, dari negara tetangga. Banyak kasus pengungkapan peredaran narkoba berskala besar di Kalbar, yang melibatkan jaringan internasional. Hal ini menuntut penegakan hukum yang lebih intensif serta koordinasi antara pemerintah Indonesia dan negara tetangga.

Kejahatan lingkungan juga menjadi perhatian di Kalbar, terutama yang terkait dengan pembalakan liar dan penyelundupan satwa langka. Hutan Kalimantan yang kaya akan keanekaragaman hayati sering menjadi sasaran pembalakan ilegal oleh kelompok-kelompok yang memiliki jaringan internasional. Kayu-kayu hasil pembalakan liar seringkali diselundupkan ke luar negeri melalui jalur darat atau laut. Selain itu, satwa langka seperti orangutan dan burung rangkong juga diperdagangkan secara ilegal ke luar negeri, mengancam kelestarian spesies-spesies tersebut. Di sisi lain, perdagangan senjata ilegal juga mulai muncul sebagai ancaman baru di Kalbar. Senjata api dan bahan peledak sering kali diselundupkan melintasi perbatasan dan bisa jatuh ke tangan kelompok-kelompok kriminal atau bahkan teroris. Hal ini meningkatkan risiko keamanan di wilayah perbatasan dan memerlukan penanganan yang serius oleh aparat keamanan, terutama di pos-pos perbatasan yang minim pengawasan. Selanjutnya, kejahatan siber yang melibatkan pelaku internasional juga menjadi tantangan di Kalbar. Kasus-kasus penipuan online, pencurian identitas, serta peretasan sistem keuangan semakin sering terjadi dan melibatkan pelaku yang beroperasi lintas negara. Kalimantan Barat, yang semakin terhubung dengan jaringan global, menghadapi ancaman meningkatnya serangan siber yang berasal dari luar negeri, terutama dari kelompok-kelompok kriminal yang terorganisir dengan baik.

Kasus pencucian uang juga sering kali berkaitan dengan kejahatan transnasional di Kalbar. Uang hasil dari perdagangan manusia, penyelundupan, dan perdagangan narkoba seringkali dicuci melalui transaksi keuangan yang melibatkan beberapa negara. Aliran dana ilegal ini menyulitkan penegakan hukum karena melibatkan sistem perbankan internasional yang rumit dan terselubung. Kolaborasi antara kelompok kriminal di dalam negeri dan jaringan internasional turut memperumit upaya pemberantasan kejahatan transnasional di Kalbar. Banyak kelompok kriminal lokal yang beroperasi sebagai perpanjangan tangan dari sindikat kejahatan internasional, memanfaatkan wilayah perbatasan untuk mempermudah akses dan operasi mereka. Kondisi ini membutuhkan kerjasama antar negara, terutama dengan Malaysia, untuk mengatasi kejahatan lintas batas secara efektif. Secara keseluruhan, penanganan kejahatan transnasional di Kalbar memerlukan pendekatan yang holistik, mulai dari penguatan pengawasan di perbatasan, pemberdayaan masyarakat lokal, hingga peningkatan kerjasama internasional. Pemerintah Indonesia bersama aparat keamanan dan penegak hukum harus terus memperkuat upaya untuk menekan angka kejahatan transnasional melalui strategi yang terkoordinasi dan berkelanjutan. Jika tidak ditangani dengan serius, kejahatan transnasional di Kalbar dapat terus berkembang dan menjadi ancaman yang semakin besar bagi stabilitas dan keamanan wilayah tersebut.

Kejahatan penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang (narkoba) pada umumnya bersifat lintas negara, mengingat produsen, kurir, dan korban bisa berasal dari negara yang berbeda-beda. Untuk itu, diperlukan kerja sama internasional karena tidak dapat ditanggulangi oleh satu negara sendiri. Mengingat kondisi geografis dan demografis, Indonesia telah menjadi salah satu negara tujuan dari peredaran narkoba. Indonesia telah menempatkan kejahatan narkoba sebagai high-risk crime dan dalam penanganannya membutuhkan upaya yang luar biasa. Untuk itu Indonesia mendorong kerja sama internasional untuk meningkatkan upaya penanggulangan isu narkoba. Saat ini terdapat 3 (tiga) Konvensi anti narkoba, yang semuanya juga telah diratifikasi oleh Indonesia, yaitu:

1. Single Convention on Narcotic Drugs 1961 melalui UU No.8 Tahun 1976;
2. Convention on Psychotropic Substances 1971 melalui UU No.8 Tahun 1996;
3. Convention against the Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 melalui UU No. 7 Tahun 1997.

Kepentingan utama Indonesia dalam menanggulangi peredaran dan perdagangan gelap narkoba adalah dengan mencegah arus keluar masuk narkoba dan prekursorinya. Indonesia berprinsip pada pendekatan berimbang antara 'supply and demand reduction', penegakan hukum dan perlindungan HAM, serta penanggulangan secara komprehensif dan terintegrasi. Pada tingkat multilateral, Indonesia terus berupaya memainkan peran aktifnya dalam memberantas peredaran dan perdagangan gelap narkoba dalam berbagai forum seperti Commission on Narcotic Drugs, Special Session of the United Nations General Assembly on the World Drug Problem, Head of National Drug Law Enforcement for Asia Pacific, dan ASEAN Senior Officials on Drug Matters dan berbagai pertemuan lainnya di bawah kerangka UNODC. Indonesia akan terus mendukung setiap upaya penguatan peran lembaga-lembaga PBB, peningkatan koordinasi antar para pemangku kepentingan pada tingkat internasional dan regional, dalam upaya menanggulangi masalah narkoba secara terpadu dan komprehensif. (RI, 2024)

Indonesia juga mendukung salah satu inisiatif yang dihasilkan pada forum internasional, yaitu pemberantasan narkoba melalui pendekatan alternative development. Pendekatan alternative development bertujuan untuk mengurangi penanaman tumbuhan mengandung zat narkoba melalui langkah-langkah pembangunan dan peningkatan penghasilan di masyarakat. Indonesia tengah menerapkan program Grand Design Alternative Development (GDAD) di Provinsi Aceh untuk periode 2016-2025 sebagai proyek percontohan nasional. (RI, 2024)

Dari segi etimologi, istilah "narkoba" memiliki akar kata yang berasal dari beberapa bahasa, yang pada akhirnya merujuk pada efek-efek tertentu terhadap tubuh manusia. Secara khusus, asal kata "narkoba" berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata "narcose" atau "narcosis", yang memiliki arti "menidurkan" atau "pembiusan". Istilah ini mengacu pada sifat obat-obatan yang dapat menyebabkan efek penenang atau bahkan penghilangan kesadaran pada penggunaanya.

Selain dari bahasa Inggris, asal kata "narkoba" juga dapat ditelusuri ke bahasa Yunani Kuno, yaitu dari kata "narke". Kata ini memiliki makna yang serupa, yaitu "terbius" atau "menidurkan". Konsep dasar dari kata ini adalah kemampuan untuk meredakan atau menghilangkan rasa sakit atau ketidaknyamanan dengan cara mengurangi kesadaran seseorang.

Dalam konteks farmakologi, istilah "drugs" atau obat-obatan merujuk pada substansi kimia yang memiliki efek khusus terhadap fungsi tubuh manusia ketika dikonsumsi. Pengaruh yang dihasilkan oleh obat-obatan ini bervariasi tergantung pada jenis dan dosisnya. Secara umum, obat-obatan dapat menyebabkan efek seperti penurunan kesadaran, penenang, stimulasi, atau bahkan halusinasi.

Pada tingkat farmakologis, obat-obatan dibagi menjadi berbagai kategori berdasarkan efeknya pada sistem saraf pusat manusia. Misalnya, narkoba adalah kelompok obat-obatan

yang memiliki potensi tinggi untuk menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologis pada penggunaannya. Narkotika sering digunakan untuk meredakan rasa sakit yang parah, namun penggunaan yang tidak terkendali atau tidak tepat dapat mengarah pada penyalahgunaan dan ketergantungan.

Efek narkotika pada pengguna bisa bervariasi dari menenangkan, mengurangi rasa sakit, hingga menyebabkan perasaan euforia atau bahkan halusinasi. Beberapa narkotika juga memiliki dampak negatif yang serius terhadap kesehatan, seperti gangguan pernapasan, penurunan kesadaran, atau bahkan kematian jika digunakan dalam dosis yang berlebihan.

Penting untuk diingat bahwa penggunaan obat-obatan harus dilakukan sesuai dengan petunjuk medis yang tepat dan di bawah pengawasan yang cermat. Penyalahgunaan obat-obatan, termasuk narkotika, dapat memiliki konsekuensi yang serius bagi kesehatan individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pendidikan tentang bahaya obat-obatan, pengawasan yang ketat dari pihak berwenang, serta upaya pencegahan penyalahgunaan obat-obatan sangatlah penting untuk dilakukan.

Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang asal usul dan efek obat-obatan, diharapkan masyarakat dapat lebih waspada dan bertanggung jawab dalam menghadapi tantangan terkait penggunaan obat-obatan, terutama dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyalahgunaan narkotika.

Dilihat dari segi etimologi, asal dari narkotika adalah dari bahasa Inggris, yakni *narcose* atau *narcois*, yang kata itu mempunyai arti menidurkan atau bisa juga pembiusan. Selain itu, kata narkotika asalnya juga dari bahasa Yunani yakni *narke*, kata itu memiliki arti terbius, sehingga tidak mempunyai rasa apapun. Sedangkan kata *drugs*, adalah kata yang dipergunakan dalam istilah di bidang dan cakupan farmakologis. *Drugs* merupakan suatu zat yang punya dan membawa efek-efek tertentu terhadap tubuh jika dipergunakan oleh pemakai. Pengaruh tersebut antara lain bisa menyebabkan pertama pada cakupan kesadaran, kedua memberikan sebuah rasa tenang, ketiga bisa juga melakukan perangsangan, dan keempat bisa menyebabkan timbulnya suatu halusinasi.

Narkotika merupakan kata singkat asalnya adalah dari narkotika dan obat berbahaya. Bila dilakukan penarikan terhadap sejarah dari hal tersebut secara penggunaan, maka sebenarnya hal tersebut adalah suatu jenis dari obat yang digunakan untuk menghilangkan rasa sakit. Obat ini juga sudah dikenal oleh manusia sejak 50.000 tahun lalu. Pada tahun tersebut obat dibuat dengan mempergunakan sari dari bunga opium, atau dalam nama latin dikenal dengan *Papaver Somniferum*. Bangsa Sumeria adalah bangsa yang menggunakan obat tersebut untuk pertama kalinya, yakni pada tahun sekitar 2000 SM. Bangsa itu menggunakannya untuk melakukan bantuan pada orang-orang yang menderita dua hal, yakni pertama mempunyai kesulitan untuk tidur dan kedua orang yang ingin melakukan peredaan pada rasa sakit. Namun pada perkembangan selanjutnya, yakni tepatnya pada tahun 1805, dokter yang asal dan bangsanya dari Jerman bernama Friedrich Wilhelm mempunyai penemuan terkait dengan adanya senyawa berupa opium murni. Senyawa tersebut pada kemudian lebih dikenal dan diberi nama morfin atau bisa juga *morphine*. Asal dari kata itu adalah dari nama Dewa yang dipercayai oleh bangsa Yunani, yakni *morpheus*, kata ini mempunyai arti dewa mimpi.

Untuk menggantikan opium yang secara wujud adalah candu mentah, maka pengenalan terhadap morfin dilakukan. Di dua negara, yakni pertama India dan kedua Persia, Alexander The Great mengenalkan candu pada masyarakat pada tahun 330 Sebelum Masehi. Pada tahun itu, candu digunakan untuk menambah bumbu pada masakan. Tujuannya adalah untuk membuat tubuh rileks. Luar biasa, pemroduksian narkotika dilakukan pada tahun 1898. Obat ini dibuat oleh pabrik terkenal di Jerman yang dikenal sebagai Bayer. Obat ini berfungsi untuk menghilangkan rasa sakit. Pada kemudian waktu, obat tersebut dikenal dan diberi nama dengan sebutan heroin. Sejak tahun itu, pada lingkup dunia media, narkotika secara resmi dan legal dipergunakan untuk tujuan pengobatan, yakni menghilangkan rasa sakit.

Kepentingan yang ada pada lingkup medis atau pengobatan adalah tujuan yang sebenarnya dari penemuan dan pada selanjutnya pengembangan narkotika. Namun selaras dengan perkembangan yang terjadi pada relasi di tingkatan internasional dan cakupannya dalam ragam hal, terutama politik, narkotika menjadi disalahgunakan. Pihak-pihak yang memiliki kepentingan pada dunia politik, menjadikan obat ini sebagai sasaran untuk mendapat untung dengan sebesar-besarnya. Penambahan zat-zat yang sifatnya adiktif pada narkotika menjadi strategi tersendiri pada pihak yang ingin menjadikannya sebagai lahan bisnis. Tentu hal ini sangat berbahaya dan dapat memberi ancaman dalam hal kehidupan masyarakat. Awal mula dari disalahgunakannya narkoba bisa dilihat dengan secara jelas melalui penambahan zat tersebut. Semula yang secara fungsi dipergunakan untuk menghilangkan rasa sakit kemudian berkembang ke arah yang lebih buruk yakni mejadi candu. Orang yang menggunakannya akan mengalami rasa ketergantungan.

Seseorang bisa mengalami halusinasi bila dalam suatu obat yang dikonsumsi terkandung atau ditambahkan dengan zat adiktif yang sifatnya berbahaya. Halusinasi yang dihasilkan juga bisa semakin tinggi dan juga dapat memberikan rasa candu, yang selanjutnya, kedua hal tersebut bisa dengan mudah melakukan pengrusakan pada dua hal penting dalam tubuh, yakni pertama jaringan yang ada pada syarat dan kedua adalah organ-organ yang memiliki peran penting. Maka akibat yang paling fatal dan serius dari hal tersebut adalah kematian. Dampak negative terkait hal ini yang dialami oleh Indonesia pada posisinya secara geografis adalah mudahnya peredaran secara gelap dari dua hal tersebut, yakni pertama narkotika dan kedua adalah obat-obat jenis lain yang juga terlarang. Kondisi global yang disertai dengan semakin majunya dua aspek, yakni jaman dan teknologi, ditambah lagi dengan kondisi social masyarakat saat ini turut tercakup di dalamnya. Tiga hal penting, yakni pertama penyalahgunaan dan peredaran secara gelap dari narkotika, kedua psikotropika, dan ketiga obat lain yang berbahaya adalah hal yang menjadi masalah sangat penting, baik pada tingkatan nasional atau pun pada tingkatan global, internasional. Kejahatan jenis ini sudah menjelma jadi suatu kejahatan yang tingkatannya sudah pada transnasional. Pelaku dari kegiatan ini adalah para kelompok kejahatan yang sudah terstruktur dan punya sistem tertentu (organized crime). Sistem yang sangat kompleks dilibatkan dalam kegiatan ini, yang secara global juga punya pengaruh serta punya kaitan sangat erat pada ketahanan nasional suatu bangsa atau negara. Itu terjadi secara langsung atau tidak langsung. Pada perkembangannya, terutama saat ini, hal ini telah berkembang menjadi masalah global dan mencakup berbagai negara, rentang usia, dan segmen masyarakat yang beragam.

Lapisan itu terdiri dari berbagai segmen, pertama mulai dari rentang usiam dari muda hingga yang paling tua, kedua mencakup juga pada kelas ekonomi, dari yang levelnya paling bawah, menengah, hingga yang berada pada paling atas. Namun yang harus menjadi perhatian paling penting adalah adanya suatu peningkatan angka secara signifikan cenderung pada lapis yang berusia produktif. Narkoba masuk ke Indonesia adalah sejak pada saat Indonesai masih dijajah oleh negara lain, yakni Belanda. Sejak saat itu juga obat-obat yang terutama berjenis opium menjadi marak untuk dipergunakan di negara Indonesia. Orang-orang yang berketurunan Cina mempunyai kecenderungan menjadi pemakai obat tersebut, yakni candu atau opium.

Secara resmi, pemerintah belanda memberikan sebuah izin tetapi hanya pada wilayah atau tempat tertentu, yang secara kegunaan tempat itu dimaksudkan untuk menjadi wadah bagi penghisap candu. Selain itu, pengadaan obat secara legal juga dianggap sebagai benar dengan didasarkan pada Undang-Undang di waktu itu. Penggunaan candu oleh para orang China pada masa itu masih menggunakan cara yang konvensional atau tradisional. Caranya adalah dengan melakukan penghisapan menggunakan satu pipa yang panjang. Hal tersebut terus berlaku hingga akhirnya mereda pada saat pemerintahan Jepang tiba di Indonesia. Jepang pada saat waktu pendudukan di Indonesia, secara sengaja melakukan penghapusan terhadap

kebijakan tersebut. Selain dihapus, penggunaan dari obat candu juga secara resmi dilakukan pelarangan. Di daerah Aceh dan juga sekitar Sumatera, ganja atau juga dikenal dengan Cannabis Sativa sangat banyak tumbuh. Tumbuhan itu juga sudah terlampau lama dipergunakan para penduduk untuk dijadikan bahan ramuan makanan pada saat sehari-hari. Sedangkan di daerah Jawa Timur, tanaman berjenis kokain atau juga dikenal sebagai Erythroxylon Coca telah banyak tumbuh dan pada masa tersebut digunakan sebagai bahan untuk ekspor. Pemerintah Belanda secara resmi membuat dan mengembangkan Undang-Undang yang dikenal sebagai Verdovende Middelen Ordonantie untuk menghindari penggunaan ilegal serta konsekuensi yang akan ditimbulkannya.

Peraturan yang berkaitan dengan masalah ini telah berlaku sejak tahun 1927 (Gazette Negara No.278 Juncto 536). Meski ada peraturan yang melarang tetapi obat-obat yang sifatnya sintetis dan beberapa obat dengan jenis lain, yang secara efek juga memiliki kesamaan, yakni membuat candu tidak dimasukkan dalam perundang-undangan. Dua hal, yakni pertama peredaran dan kedua penyalahgunaan narkoba di Indonesia, secara data kemunculannya untuk pertama kali sejak tahun 1969. Maka penulis mengurai berdasar periode perkembangan obat dan juga jenis zat didasarkan pada paling banyaknya beredar di Indonesia. Berikut tujuh poin penting yang diurai secara naratif oleh penulis:

1. Pada rentang tahun sejak 1969-1973: Kencenderungan jenis yang menjadi paling banyak dipergunakan serta juga dilakukan penyalahgunaan adalah pertama morfin dan kedua ganja.
2. Dari tahun 1973 hingga 1976, jenis obat yang paling banyak digunakan dan juga disalahgunakan adalah morfin, ganja, barbitut, dan obat tidur lainnya seperti sedativa dan hipnotika.
3. Dari tahun 1976 hingga 1979, jenis ganja, barbitut, dan sedativa/hipnotika adalah yang paling banyak digunakan dan disalahgunakan. sementara jumlah morfin yang digunakan berkurang.
4. Dari tahun 1979 hingga 1985, ganja adalah jenis yang paling banyak digunakan dan disalahgunakan, diikuti oleh barbitut, ketiga jenis hipnotika lainnya, dan keempat minuman keras. Penggunaannya terhadap morfin mulai meningkat. Selain itu, heroin, juga dikenal sebagai putaw, mulai memasuki pasar narkoba ilegal Indonesia.
5. Sejak 1985-1990, ganja adalah jenis yang paling banyak digunakan dan disalahgunakan. Barbitut adalah jenis kedua, dan jenis ketiga hipnotik lainnya adalah minuman keras, morfin, pethidin, dan heroin (putaw).
6. Sejak tahun 1990-1995, ganja adalah jenis yang paling banyak digunakan dan disalahgunakan. Barbitut adalah jenis kedua yang paling sering digunakan, dan jenis ketiga hipnotika lainnya adalah minuman keras, pethidin, morfin, dan heroin (putaw). Kokain, amphetamine, ekstasi, dan shabu-shabu memulai kiprahnya di pasar narkoba ilegal Indonesia.
7. Dari tahun 1995 hingga 2000, jenis yang paling sering digunakan dan disalahgunakan adalah ganja, barbitut, ketiga jenis hipnotika psikotropika, minuman keras, pethidin, morfin, heroin, kokain, amphetamine, ekstasi, dan sabu-sabu.

Kejahatan yang berfokus pada narkoba secara kondisi di Indonesia memang sangat memprihatinkan. Negara ini pada awalnya hanya menjadi konsumen dari barang-barang tersebut. Namun, saat ini, tempat yang semula hanya menjadi area pemasaran secara dramatis berubah menjadi produsen. Negara ini saat ini menjadi salah satu dari banyak negara yang melakukan pemroduksian narkoba, bersama dengan berbagai obat yang dilarang lainnya. Dengan demikian, Indonesia menetapkan status darurat narkoba pada tahun 2015.

Kondisi kejahatan yang berfokus pada narkoba di Indonesia saat ini berada pada titik yang sangat memprihatinkan. Awalnya, Indonesia hanya dikenal sebagai negara konsumen narkoba, di mana narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya masuk melalui jalur-jalur

penyelundupan untuk kemudian dikonsumsi oleh masyarakat lokal. Namun, seiring berjalannya waktu, situasi ini telah mengalami perubahan yang drastis. Indonesia yang dulunya hanya menjadi pasar bagi peredaran narkoba, kini telah berubah menjadi salah satu negara produsen narkoba, dengan peningkatan signifikan dalam aktivitas produksi narkoba di dalam negeri.

Perubahan ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari berbagai faktor yang berinteraksi secara kompleks. Salah satu faktor utamanya adalah meningkatnya permintaan domestik akan narkoba, yang mendorong para sindikat untuk mulai memproduksi narkoba di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selain itu, ketatnya pengawasan di perbatasan dan upaya penindakan terhadap penyelundupan internasional telah membuat para pelaku kejahatan beralih ke produksi lokal sebagai cara untuk menghindari deteksi dan penindakan hukum.

Produksi narkoba di Indonesia tidak hanya mencakup narkoba tradisional seperti ganja, tetapi juga berbagai jenis narkoba sintesis yang lebih sulit dideteksi dan memiliki efek yang lebih berbahaya. Pabrik-pabrik narkoba ilegal mulai bermunculan di berbagai daerah, terutama di kawasan-kawasan yang terpencil dan sulit dijangkau oleh aparat penegak hukum. Di sini, para sindikat kejahatan memanfaatkan kelemahan dalam pengawasan serta celah-celah dalam sistem hukum untuk menjalankan operasinya tanpa terdeteksi.

Kondisi ini semakin diperburuk oleh adanya keterlibatan jaringan internasional dalam produksi dan distribusi narkoba di Indonesia. Sindikat-sindikat internasional bekerja sama dengan kelompok-kelompok lokal untuk memproduksi, mengedarkan, dan menyelundupkan narkoba ke berbagai negara. Kerjasama ini membuat upaya pemberantasan narkoba menjadi semakin sulit, karena melibatkan jaringan yang luas dan terorganisir dengan baik. Selain itu, teknologi yang semakin canggih juga digunakan oleh sindikat-sindikat ini untuk memperluas jangkauan operasional mereka dan menghindari deteksi oleh aparat penegak hukum.

Dengan semakin meningkatnya produksi narkoba di dalam negeri, Indonesia tidak lagi hanya menghadapi masalah penyelundupan narkoba dari luar negeri, tetapi juga tantangan besar dalam mengatasi produksi domestik. Pemerintah Indonesia menyadari seriusnya ancaman ini, dan pada tahun 2015, Indonesia menetapkan status darurat narkoba. Penetapan status darurat ini bukan hanya sebuah pernyataan simbolis, tetapi merupakan langkah penting untuk memperkuat upaya pemberantasan narkoba di semua tingkatan, mulai dari pencegahan, penindakan hukum, hingga rehabilitasi bagi pengguna narkoba.

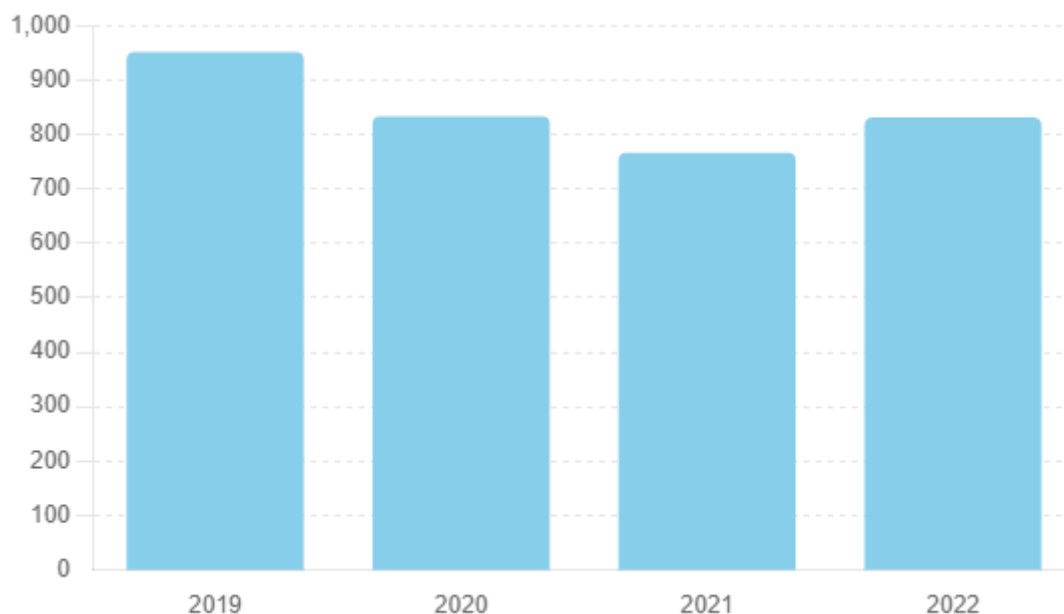
Penetapan status darurat narkoba pada tahun 2015 menandai dimulainya berbagai inisiatif dan kebijakan baru yang lebih agresif dalam menangani masalah narkoba di Indonesia. Salah satunya adalah peningkatan operasi penindakan terhadap pabrik-pabrik narkoba ilegal dan jaringan distribusi mereka. Selain itu, pemerintah juga memperkuat kerjasama internasional untuk menekan aliran narkoba dari dan ke Indonesia. Penegakan hukum yang lebih ketat diterapkan, dengan hukuman yang lebih berat bagi para pelaku kejahatan narkoba, termasuk hukuman mati bagi bandar-bandar narkoba yang terbukti bersalah.

Di sisi lain, pemerintah juga meningkatkan upaya pencegahan melalui kampanye anti-narkoba yang lebih masif, baik di sekolah-sekolah, komunitas, maupun media massa. Edukasi tentang bahaya narkoba menjadi fokus utama, dengan tujuan untuk menurunkan angka pengguna narkoba, terutama di kalangan remaja dan generasi muda. Selain itu, fasilitas rehabilitasi bagi pengguna narkoba diperbanyak dan ditingkatkan kualitasnya, agar mereka yang terjerat dalam penyalahgunaan narkoba dapat pulih dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.

Namun, meskipun berbagai langkah telah diambil, tantangan dalam pemberantasan narkoba di Indonesia masih sangat besar. Sindikat narkoba terus beradaptasi dengan situasi baru, mencari cara-cara baru untuk menjalankan operasi mereka tanpa terdeteksi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang terus-menerus berkembang dan inovatif dalam upaya

pemberantasan narkoba. Pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan komunitas internasional perlu bekerja sama dengan lebih erat dan efektif untuk menghadapi ancaman yang terus berkembang ini.

Dengan demikian, Indonesia saat ini berada dalam situasi yang sangat serius terkait dengan masalah narkoba. Penetapan status darurat narkoba pada tahun 2015 adalah langkah penting yang menunjukkan komitmen pemerintah untuk menangani masalah ini dengan serius. Namun, upaya tersebut harus terus ditingkatkan dan diperkuat agar Indonesia dapat mengatasi ancaman narkoba yang semakin kompleks dan meluas. Hanya dengan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif narkoba terhadap masyarakatnya dan membangun masa depan yang lebih sehat dan aman.



Grafik 2 Perbandingan Jumlah Kasus Penyelundupan Narkoba 2019-2022

Perbandingan jumlah kasus penyelundupan narkoba di Indonesia dari tahun 2019 hingga 2022 menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2019, jumlah kasus mencapai puncaknya dengan 951 kasus. Hal ini mungkin disebabkan oleh peningkatan aktivitas penyelundupan atau upaya penegakan hukum yang lebih efektif dalam mendeteksi dan menangkap pelaku penyelundupan.

Namun, pada tahun 2020, terjadi penurunan yang signifikan dengan jumlah kasus mencapai 833. Penurunan ini bisa dihubungkan dengan berbagai faktor, termasuk mungkin adanya pembatasan mobilitas dan peningkatan pengawasan selama pandemi COVID-19, yang mempersulit jaringan penyelundup dalam menjalankan operasi mereka. Pada tahun 2021, jumlah kasus kembali menurun menjadi 766. Penurunan ini dapat mencerminkan kelanjutan dari upaya penegakan hukum yang ketat serta adaptasi jaringan penyelundup terhadap situasi pandemi yang masih berlangsung.

Namun, pada tahun 2022, jumlah kasus kembali meningkat menjadi 831. Kenaikan ini mungkin mencerminkan adaptasi jaringan penyelundup terhadap kondisi yang berubah atau peningkatan kembali aktivitas perdagangan narkoba seiring dengan pelonggaran pembatasan mobilitas dan aktivitas ekonomi.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat fluktuasi, masalah penyelundupan narkoba tetap menjadi tantangan serius di Indonesia. Upaya penegakan hukum yang konsisten, serta strategi pencegahan dan edukasi yang efektif, sangat penting untuk mengurangi angka penyelundupan narkoba di masa mendatang.

Perbandingan jumlah kasus penyelundupan narkoba di Indonesia dari tahun 2019 hingga 2022 menunjukkan adanya variasi yang signifikan dari tahun ke tahun:

- Tahun 2019: Jumlah kasus penyelundupan narkoba tercatat sebanyak 951. Angka ini merupakan yang tertinggi dalam periode yang dianalisis. Peningkatan kasus pada tahun ini mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan aktivitas jaringan penyelundup narkoba dan upaya penegakan hukum yang lebih efektif dalam mendeteksi dan menangkap pelaku penyelundupan.
- Tahun 2020: Pada tahun 2020, terjadi penurunan jumlah kasus menjadi 833. Penurunan ini dapat dikaitkan dengan pembatasan mobilitas dan aktivitas ekonomi akibat pandemi COVID-19. Langkah-langkah lockdown dan pembatasan sosial mungkin telah menghambat operasi jaringan penyelundup narkoba, sehingga mengurangi jumlah kasus yang terdeteksi.
- Tahun 2021: Jumlah kasus terus menurun pada tahun 2021, mencapai angka 766. Penurunan ini bisa mencerminkan keberhasilan strategi penegakan hukum dan pencegahan yang diterapkan oleh pemerintah dan pihak berwenang. Namun, ini juga bisa menunjukkan adaptasi jaringan penyelundup dalam menghindari deteksi selama masa pandemi.
- Tahun 2022: Pada tahun 2022, jumlah kasus kembali meningkat menjadi 831. Kenaikan ini mungkin disebabkan oleh pelanggaran pembatasan pandemi dan peningkatan aktivitas ekonomi yang memfasilitasi kembalinya operasi penyelundup narkoba. Ini menunjukkan bahwa jaringan penyelundup narkoba tetap aktif dan mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi eksternal.

Data yang ditunjukkan dalam matriks perbandingan dan bar chart mengindikasikan bahwa penyelundupan narkoba di Indonesia mengalami fluktuasi selama periode 2019 hingga 2022. Meskipun terdapat penurunan signifikan pada tahun 2020 dan 2021, kenaikan kembali pada tahun 2022 menekankan perlunya upaya berkelanjutan dalam penegakan hukum, pencegahan, dan edukasi masyarakat untuk memerangi masalah penyelundupan narkoba. Strategi yang adaptif dan kerjasama lintas sektor sangat penting untuk mengatasi tantangan yang terus berkembang ini.

Dialog Bilateral

Dialog bilateral antara Indonesia dan Malaysia mengenai transaksi ilegal merupakan langkah penting yang diambil oleh kedua negara untuk menanggulangi berbagai kejahatan lintas batas. Transaksi ilegal seperti penyelundupan barang, perdagangan manusia, narkoba, hingga pergerakan keuangan ilegal menjadi isu yang mendesak, mengingat kedua negara berbagi wilayah perbatasan yang panjang, baik di darat maupun di laut. Pada salah satu pertemuan bilateral, delegasi kedua negara berkumpul untuk membahas strategi dan langkah-langkah bersama dalam menghadapi tantangan ini. Dalam pertemuan tersebut, delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan membuka dialog dengan menyoroti meningkatnya kasus penyelundupan barang di wilayah perbatasan. Indonesia menyatakan keprihatinannya terhadap barang-barang ilegal seperti rokok tanpa cukai, bahan bakar minyak, serta barang elektronik yang masuk secara ilegal dari Malaysia melalui jalur-jalur yang sulit diawasi. Delegasi Indonesia juga menekankan pentingnya kerja sama yang lebih erat antara kedua negara dalam pengawasan perbatasan. (KEMHAN, 2022)

Berbagi Informasi Strategis

Berbagi informasi strategis terkait transaksi ilegal antara Malaysia dan Indonesia adalah bagian penting dari upaya kedua negara untuk menanggulangi berbagai bentuk kejahatan lintas batas. Dengan perbatasan yang luas dan jalur perdagangan yang sibuk, kedua negara kerap menghadapi tantangan seperti penyelundupan, perdagangan manusia, narkoba, dan pencucian uang. Dalam kerangka kerjasama bilateral, pertukaran informasi strategis menjadi langkah

kunci untuk mengatasi transaksi ilegal yang semakin kompleks dan terorganisir. Salah satu fokus utama dalam berbagi informasi adalah penyelundupan barang, yang sering terjadi di perbatasan darat Kalimantan dan Sarawak, serta jalur laut di Selat Malaka. Melalui mekanisme pertukaran data intelijen, otoritas Indonesia dan Malaysia secara rutin berbagi informasi mengenai jalur-jalur penyelundupan yang digunakan oleh sindikat kriminal, termasuk identitas para pelaku, jenis barang yang diselundupkan, serta titik-titik transit. Dengan adanya pertukaran informasi ini, operasi gabungan antara aparat penegak hukum kedua negara dapat lebih efektif dalam menangkap pelaku penyelundupan dan menghentikan aliran barang ilegal. (KEMHAN, 2022)

Selain itu, perdagangan manusia menjadi isu yang sangat penting dalam kerjasama ini. Banyak kasus perdagangan manusia yang melibatkan warga Indonesia yang diselundupkan secara ilegal ke Malaysia dengan janji pekerjaan. Melalui kerjasama berbagi informasi strategis, kedua negara bertukar data mengenai sindikat perdagangan manusia, rute yang mereka gunakan, serta modus operandi perekrutan. Pertukaran informasi ini memungkinkan penegak hukum untuk melacak dan menghentikan jaringan perdagangan manusia yang beroperasi di wilayah perbatasan dan melindungi para korban sebelum mereka dieksploitasi. Isu narkoba juga menjadi prioritas dalam berbagi informasi strategis antara Malaysia dan Indonesia. Kedua negara telah menyepakati untuk berbagi data terkait pergerakan narkoba lintas batas, termasuk pemasok, kurir, dan jaringan distribusi. Jalur darat dan laut sering kali dimanfaatkan oleh sindikat narkoba internasional untuk menyelundupkan obat-obatan terlarang dari satu negara ke negara lain. Informasi strategis yang dibagikan membantu kedua negara dalam mengidentifikasi jaringan narkoba lintas negara dan melakukan operasi penindakan yang lebih terkoordinasi. Keamanan maritim juga memainkan peran penting dalam menanggulangi transaksi ilegal. Melalui kerjasama ini, Indonesia dan Malaysia berbagi informasi real-time tentang pergerakan kapal yang mencurigakan di wilayah perairan yang rawan. Informasi ini mencakup data identifikasi otomatis (AIS) kapal, jalur pelayaran, dan aktivitas yang tidak sesuai dengan aturan. Dengan adanya informasi ini, patroli gabungan di perairan Selat Malaka dapat mencegah aktivitas ilegal seperti perompakan, penyelundupan, dan perdagangan manusia. (KEMHAN, 2022)

Tantangan dalam transaksi keuangan ilegal seperti pencucian uang juga menjadi fokus dari pertukaran informasi strategis. Sindikat kejahatan sering kali menggunakan jaringan keuangan untuk mencuci uang hasil kejahatan lintas batas. Indonesia dan Malaysia bekerja sama dengan otoritas perbankan dan lembaga keuangan untuk memantau transaksi keuangan yang mencurigakan. Informasi tentang aliran dana ilegal yang melintasi kedua negara dibagikan untuk mencegah pencucian uang, dan tindakan hukum diambil terhadap pelaku yang terlibat dalam transaksi tersebut. Kerjasama berbagi informasi strategis ini juga melibatkan penggunaan teknologi canggih, seperti sistem pengawasan berbasis satelit dan drone untuk memantau aktivitas di wilayah perbatasan yang sulit diakses. Kedua negara sepakat untuk berbagi data yang diperoleh dari teknologi ini untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan lebih dini. Teknologi ini memperkuat kemampuan deteksi dan respons terhadap aktivitas ilegal, yang sebelumnya sulit dideteksi melalui patroli konvensional. Selain itu, berbagi informasi terkait regulasi dan kebijakan juga penting untuk menekan transaksi ilegal. Indonesia dan Malaysia secara berkala bertukar informasi tentang perubahan kebijakan perdagangan dan keamanan perbatasan, yang dapat mempengaruhi dinamika transaksi ilegal. Melalui kerjasama ini, kedua negara dapat mengharmonisasi regulasi untuk meminimalisir celah hukum yang sering dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan lintas batas. Salah satu keberhasilan besar dari berbagi informasi strategis antara Indonesia dan Malaysia adalah pembongkaran beberapa sindikat penyelundupan skala besar yang beroperasi di perbatasan darat dan laut. Melalui operasi gabungan yang dipicu oleh informasi yang dibagikan kedua negara, banyak sindikat yang

berhasil dihentikan, dan jumlah transaksi ilegal yang merugikan negara dapat ditekan secara signifikan. (KEMHAN, 2022)

Keberlanjutan berbagi informasi strategis antara Malaysia dan Indonesia dalam memerangi transaksi ilegal semakin diperkuat dengan pembentukan mekanisme komunikasi yang lebih cepat dan efisien. Salah satu langkah nyata yang diambil kedua negara adalah pembentukan pusat pengawasan bersama di wilayah perbatasan. Pusat ini berfungsi sebagai pusat komando di mana aparat penegak hukum dari kedua negara dapat berkoordinasi secara langsung dan real-time. Dengan adanya pusat ini, kedua negara dapat bertukar informasi seketika terkait pergerakan mencurigakan, jaringan kejahatan yang terdeteksi, hingga rencana operasi gabungan di wilayah perbatasan. Pertukaran informasi strategis juga melibatkan lembaga-lembaga intelijen kedua negara yang terus memperbarui data tentang jaringan kriminal lintas batas. Misalnya, intelijen Malaysia dan Indonesia secara rutin berbagi laporan tentang aktivitas kelompok penyelundup dan sindikat perdagangan manusia yang beroperasi di sepanjang perbatasan Kalimantan dan Sarawak. Dengan data ini, baik Malaysia maupun Indonesia dapat merencanakan langkah-langkah pencegahan yang lebih tepat, misalnya dengan memperkuat pengawasan di titik-titik rawan atau menempatkan petugas tambahan di pos-pos perbatasan yang sering dilalui. (KEMHAN, 2022)

Selain memperketat pengawasan di darat dan laut, kerjasama ini juga melibatkan aspek pencegahan di sektor keuangan. Kedua negara telah memperluas cakupan berbagi informasi strategis untuk melibatkan lembaga keuangan seperti bank sentral dan unit-unit intelijen keuangan. Melalui pertukaran data ini, aliran uang yang mencurigakan, yang sering kali merupakan hasil dari aktivitas ilegal seperti perdagangan manusia, penyelundupan, atau peredaran narkoba, dapat dilacak dan dihentikan. Kolaborasi ini memungkinkan kedua negara untuk bertindak lebih tegas terhadap praktik pencucian uang, yang selama ini menjadi celah bagi para pelaku kejahatan lintas negara. Salah satu contoh nyata dari keberhasilan kerjasama ini adalah penangkapan besar-besaran sindikat narkoba internasional yang mencoba menyelundupkan sabu-sabu melalui jalur laut dari Malaysia ke Indonesia. Informasi strategis yang diperoleh dari intelijen Malaysia tentang rute pengiriman narkoba, identitas pelaku, dan waktu pengiriman, memungkinkan aparat penegak hukum Indonesia untuk melakukan penyergapan di laut dan menggagalkan upaya penyelundupan tersebut. Operasi ini membuktikan bahwa berbagi informasi strategis antara kedua negara mampu mencegah transaksi ilegal yang berpotensi merugikan generasi muda di kedua negara. (KEMHAN, 2022)

Selain itu, kerjasama dalam berbagi informasi juga memperluas cakupannya pada isu keamanan digital dan siber. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi dalam transaksi ilegal, baik Indonesia maupun Malaysia menyadari bahwa ancaman di dunia maya semakin serius. Dalam beberapa tahun terakhir, kedua negara mulai berbagi informasi tentang serangan siber yang berpotensi memengaruhi transaksi ilegal, termasuk pencurian data pribadi yang digunakan untuk memfasilitasi kejahatan lintas negara. Melalui pertukaran informasi ini, Malaysia dan Indonesia dapat saling mendukung dalam memperkuat pertahanan siber nasional mereka. Di sisi diplomatik, kerjasama ini juga menciptakan platform yang lebih solid bagi kedua negara dalam memperkuat hubungan di tingkat regional. Dengan menjadi mitra strategis dalam menanggulangi transaksi ilegal, Indonesia dan Malaysia dapat mempresentasikan hasil kerjasama mereka dalam forum-forum regional seperti ASEAN. Ini tidak hanya meningkatkan citra kedua negara sebagai pelopor keamanan kawasan, tetapi juga mendorong negara-negara tetangga lainnya untuk berpartisipasi dalam upaya kolektif menghadapi tantangan kejahatan lintas negara di Asia Tenggara. (KEMHAN, 2022)

Sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kerjasama, kedua negara juga menyepakati untuk melibatkan masyarakat lokal dalam upaya pencegahan transaksi ilegal. Edukasi dan pelibatan masyarakat, terutama di wilayah-wilayah perbatasan, menjadi bagian penting dalam program pencegahan. Melalui program-program ini, masyarakat diimbau untuk

melaporkan aktivitas mencurigakan kepada pihak berwenang, serta diberikan pemahaman tentang dampak negatif dari penyelundupan dan perdagangan ilegal terhadap ekonomi dan stabilitas sosial. Ke depan, Indonesia dan Malaysia berkomitmen untuk terus memperkuat sistem berbagi informasi strategis mereka. Rencana untuk mengembangkan teknologi baru, seperti penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam mendeteksi pola aktivitas ilegal, menjadi bagian dari inisiatif bersama untuk memerangi transaksi ilegal yang semakin canggih. Kedua negara juga berencana untuk memperluas cakupan kerjasama ini ke sektor-sektor baru yang mungkin rentan terhadap penyalahgunaan, seperti industri digital dan logistik internasional. (KEMHAN, 2022)

Dengan terus meningkatkan kolaborasi dan pertukaran informasi strategis, baik Indonesia maupun Malaysia optimis bahwa upaya mereka dalam menanggulangi transaksi ilegal akan semakin efektif. Kerjasama ini bukan hanya menciptakan keamanan dan stabilitas di kedua negara, tetapi juga memperkuat posisi mereka sebagai pemimpin dalam menangani kejahatan lintas batas di kawasan Asia Tenggara. Melalui pendekatan yang kooperatif dan inovatif, kedua negara berharap dapat mengurangi dampak negatif dari transaksi ilegal dan menciptakan kawasan yang lebih aman bagi seluruh rakyatnya. Secara keseluruhan, berbagi informasi strategis tentang transaksi ilegal antara Malaysia dan Indonesia telah membuktikan efektivitasnya dalam menangani tantangan keamanan lintas negara. Dengan terus memperkuat pertukaran informasi ini, kedua negara tidak hanya melindungi kepentingan nasional mereka, tetapi juga menciptakan stabilitas di kawasan yang lebih luas. Implementasi kerjasama ini menunjukkan komitmen kuat kedua negara untuk memerangi kejahatan lintas batas secara kolektif, dengan menggunakan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data. (KEMHAN, 2022)

Kedua negara memahami bahwa tantangan di masa depan akan semakin kompleks, terutama dengan perubahan cepat di bidang teknologi dan dinamika global yang mempengaruhi jaringan kejahatan lintas negara. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk memperkuat infrastruktur pertukaran informasi dan pengembangan teknologi baru menjadi prioritas utama. Salah satu rencana strategis yang sedang dikembangkan adalah integrasi lebih dalam antara sistem teknologi informasi keamanan kedua negara. Melalui inisiatif ini, Indonesia dan Malaysia berencana untuk menghubungkan pusat-pusat data keamanan mereka dengan teknologi berbasis cloud yang aman. Hal ini akan memungkinkan informasi tentang transaksi ilegal, baik yang terjadi di darat, laut, maupun dunia maya, untuk dikumpulkan, dianalisis, dan dibagikan secara instan. Sistem ini juga diharapkan dapat mempercepat respons terhadap ancaman dengan menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk memprediksi pola kejahatan lintas batas. Sebagai bagian dari pengembangan ini, kedua negara juga sepakat untuk membangun jaringan radar maritim yang lebih luas di sepanjang wilayah perbatasan laut mereka. Radar ini akan mampu mendeteksi kapal-kapal yang tidak terdaftar atau melakukan aktivitas ilegal di perairan kedua negara. Dengan adanya radar ini, informasi tentang pergerakan kapal yang mencurigakan dapat langsung dibagikan antara Indonesia dan Malaysia, sehingga patroli gabungan dapat diluncurkan dengan cepat untuk mencegah penyelundupan atau perompakan. Kolaborasi dalam keamanan maritim ini juga didukung oleh negara-negara tetangga di ASEAN, yang bersama-sama berkomitmen menjaga keamanan Selat Malaka sebagai jalur perdagangan internasional yang vital. (KEMHAN, 2022)

Tidak hanya di bidang maritim, Indonesia dan Malaysia juga memperkuat kerjasama di sektor darat, terutama di perbatasan Kalimantan dan Sarawak yang sering menjadi lokasi penyelundupan barang. Pemerintah kedua negara berencana untuk mendirikan pos-pos perbatasan tambahan yang dilengkapi dengan teknologi canggih, termasuk pemindai barang otomatis dan kamera pengawas berbasis sensor. Pos-pos ini akan menjadi pusat informasi penting yang menghubungkan data dari operasi keamanan di lapangan dengan pusat komando di kedua negara. Dengan demikian, setiap aktivitas mencurigakan di perbatasan darat dapat

segera diidentifikasi dan ditangani. Selain penguatan teknologi, elemen manusia juga tetap menjadi fokus penting dalam berbagi informasi strategis ini. Kedua negara berkomitmen untuk terus melakukan pelatihan bersama bagi aparat keamanan, bea cukai, dan otoritas imigrasi. Pelatihan ini mencakup teknik analisis intelijen, penanganan kasus penyelundupan, hingga penanggulangan kejahatan siber. Melalui program-program pelatihan ini, personel dari kedua negara dapat bekerja lebih efektif di lapangan serta meningkatkan kemampuan dalam mendeteksi dan mengatasi ancaman yang semakin kompleks. Sementara itu, diplomasi keamanan yang melibatkan negara-negara tetangga seperti Singapura, Thailand, dan Brunei juga semakin diperkuat. Indonesia dan Malaysia menginisiasi forum regional untuk berbagi informasi tentang transaksi ilegal dan tantangan keamanan lintas negara di kawasan Asia Tenggara. Forum ini memungkinkan negara-negara di kawasan untuk berdiskusi secara terbuka mengenai ancaman yang mereka hadapi, sekaligus mengembangkan strategi bersama dalam menanggulangi kejahatan lintas negara, seperti perdagangan narkoba, perompakan, serta kejahatan terorganisir. (KEMHAN, 2022)

Dalam upaya melibatkan lebih banyak sektor, kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Malaysia juga mencakup sektor swasta. Kedua negara mendorong perusahaan-perusahaan di bidang logistik, perbankan, dan teknologi untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan transaksi ilegal. Perusahaan-perusahaan ini, terutama yang beroperasi di wilayah perbatasan atau di sektor keuangan, diminta untuk melaporkan aktivitas yang mencurigakan dan memperketat kontrol internal mereka. Melalui pelibatan sektor swasta, baik Indonesia maupun Malaysia berharap dapat memotong jalur keuangan dan logistik yang sering dimanfaatkan oleh sindikat kejahatan lintas negara. Kerjasama ini juga semakin mengarah ke peningkatan peran masyarakat dalam melaporkan aktivitas ilegal. Di beberapa wilayah perbatasan, pemerintah kedua negara meluncurkan program kesadaran masyarakat tentang dampak negatif dari transaksi ilegal terhadap stabilitas ekonomi dan sosial. Masyarakat setempat diajak untuk aktif melaporkan penyelundupan, perdagangan manusia, dan kegiatan ilegal lainnya kepada pihak berwenang. Upaya ini telah mulai menunjukkan hasil positif, dengan meningkatnya jumlah laporan masyarakat yang membantu operasi penegakan hukum di lapangan. Melalui pendekatan yang holistik, berbagi informasi strategis antara Indonesia dan Malaysia dalam memerangi transaksi ilegal telah menciptakan model kerjasama yang adaptif dan inovatif. Keberhasilan ini tidak hanya mengurangi volume kejahatan lintas batas, tetapi juga meningkatkan rasa aman di kalangan masyarakat di kedua negara. Dengan terus memperkuat fondasi kerjasama ini, Indonesia dan Malaysia diharapkan dapat menghadapi tantangan keamanan di masa depan dengan lebih siap, serta memperkuat posisi mereka sebagai pemimpin dalam menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara. Komitmen yang terus berlanjut dari kedua negara untuk memperkuat kerjasama dalam berbagi informasi strategis ini menjadi bukti nyata bahwa keamanan dan stabilitas kawasan dapat dicapai melalui kolaborasi yang transparan, efektif, dan berbasis teknologi. Dengan adanya kerangka kerjasama ini, baik Indonesia maupun Malaysia mampu menjaga integritas wilayah mereka dan memastikan bahwa kejahatan lintas negara tidak lagi menjadi ancaman yang sulit ditangani. (KEMHAN, 2022)

Keberlanjutan kerjasama strategis antara Indonesia dan Malaysia dalam berbagi informasi terkait transaksi ilegal terus berkembang seiring dengan peningkatan kompleksitas ancaman yang dihadapi kedua negara. Salah satu perkembangan terbaru dalam kerjasama ini adalah pengintegrasian sistem pemantauan lintas batas yang lebih canggih, memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan analisis data besar (big data). Dengan memanfaatkan kemampuan analitik yang lebih maju, baik Indonesia maupun Malaysia dapat mendeteksi pola transaksi ilegal, mengidentifikasi ancaman lebih cepat, dan memprediksi tren aktivitas kejahatan lintas batas yang sebelumnya sulit dilacak. Sistem baru ini tidak hanya difokuskan pada keamanan fisik di perbatasan, tetapi juga merambah ke sektor digital. Ancaman dunia siber, seperti transaksi keuangan ilegal melalui mata uang kripto atau penyalahgunaan

teknologi blockchain untuk mencuci uang hasil dari aktivitas kriminal, mulai mendapatkan perhatian yang serius dari kedua negara. Melalui berbagi informasi terkait metode dan teknologi terbaru yang digunakan oleh sindikat kriminal dalam ruang digital, Indonesia dan Malaysia berupaya untuk meningkatkan kesiapan mereka dalam menangani ancaman siber yang bersifat lintas batas. Kedua negara juga bekerja sama dengan sektor fintech dan institusi keuangan untuk memperketat pengawasan dan pencegahan terhadap pencucian uang di dunia maya. (KEMHAN, 2022)

Selain itu, penguatan sistem peringatan dini (early warning system) di sektor maritim menjadi salah satu pencapaian utama kerjasama ini. Dengan peningkatan frekuensi patroli laut dan pembaruan sistem radar yang didukung oleh informasi real-time, Indonesia dan Malaysia mampu meningkatkan efektivitas mereka dalam menanggulangi aktivitas ilegal di laut, seperti perompakan, penyelundupan narkoba, dan perdagangan manusia. Kedua negara kini tidak hanya memantau pergerakan kapal di Selat Malaka, tetapi juga memperluas pengawasan hingga Laut Natuna Utara dan Laut Sulu, di mana aktivitas kriminal lintas batas sering terjadi. Pusat komando gabungan yang dioperasikan oleh kedua negara semakin memperkokoh koordinasi lapangan, di mana setiap informasi yang didapatkan dari patroli gabungan, analisis intelijen, maupun laporan masyarakat dapat diproses dengan cepat dan diteruskan kepada pihak berwenang di lapangan. Dengan struktur ini, kedua negara berhasil meningkatkan kecepatan respons dalam menindak aktivitas ilegal, serta memperkuat operasi gabungan yang melibatkan berbagai lembaga, termasuk militer, kepolisian, dan bea cukai. Melalui operasi terkoordinasi, sindikat kejahatan yang sebelumnya sulit dijangkau kini dapat dihentikan lebih efektif. (KEMHAN, 2022)

Di sisi diplomatik, kerjasama berbagi informasi strategis ini semakin mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia. Kesuksesan kerjasama ini diakui di berbagai forum internasional dan regional, termasuk ASEAN dan Interpol. Dalam forum-forum tersebut, Indonesia dan Malaysia sering menjadi contoh bagaimana kerjasama bilateral yang didukung oleh pertukaran informasi strategis dapat berhasil menanggulangi tantangan keamanan yang bersifat lintas negara. Kedua negara juga menggunakan forum ini untuk mengajak negara-negara tetangga lainnya, seperti Singapura, Filipina, dan Thailand, untuk bergabung dalam inisiatif kolektif dalam menjaga keamanan kawasan. Lebih jauh lagi, berbagi informasi strategis ini juga membuka peluang kerjasama di sektor-sektor baru, seperti keamanan lingkungan dan sumber daya alam. Dengan seringnya kasus penyelundupan kayu ilegal, satwa langka, serta eksploitasi sumber daya alam secara ilegal di kawasan perbatasan, Indonesia dan Malaysia mulai mengembangkan sistem pertukaran informasi untuk melacak aktivitas ilegal yang berkaitan dengan lingkungan. Informasi mengenai jalur distribusi kayu dan satwa yang diselundupkan, serta identitas kelompok pelaku, kini menjadi bagian dari pertukaran data strategis antara kedua negara. Langkah ini tidak hanya membantu dalam menjaga keberlanjutan lingkungan, tetapi juga melindungi keanekaragaman hayati yang sangat penting bagi kedua negara. Sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas, kedua negara juga menyelenggarakan berbagai workshop dan pelatihan yang melibatkan para ahli dari berbagai sektor. Pelatihan ini tidak hanya untuk memperkuat kapasitas intelijen dan penegakan hukum, tetapi juga untuk melibatkan lebih banyak aktor di sektor swasta dan masyarakat sipil. Melalui pelatihan ini, Indonesia dan Malaysia berharap dapat membangun jejaring informasi yang lebih luas dan inklusif, di mana masyarakat lokal dan pelaku industri dapat berperan aktif dalam mencegah dan melaporkan transaksi ilegal. (KEMHAN, 2022)

Dengan semua upaya ini, Indonesia dan Malaysia optimis bahwa kerjasama mereka dalam berbagi informasi strategis akan terus beradaptasi dan berkembang sesuai dengan tantangan baru yang muncul. Teknologi, kebijakan, dan kerjasama multilateral akan terus menjadi kunci dalam menjaga efektivitas pertukaran informasi ini. Kedua negara berkomitmen untuk terus memperbarui pendekatan mereka, sehingga sistem pertukaran informasi dapat lebih

proaktif dalam mencegah kejahatan lintas batas, bukan hanya reaktif setelah kejahatan terjadi. Di masa depan, Indonesia dan Malaysia juga berencana memperluas kerjasama ini ke bidang lain yang berpotensi terkait dengan transaksi ilegal, seperti ekonomi digital dan perdagangan lintas negara. Sebagai dua negara besar di Asia Tenggara, keduanya menyadari bahwa integrasi yang lebih erat dalam hal pertukaran informasi akan memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan kemakmuran di kawasan. Dengan adanya fondasi yang kuat dalam berbagi informasi strategis, kedua negara siap menghadapi tantangan keamanan di masa depan, sembari menjaga hubungan yang erat dan saling menguntungkan. (KEMHAN, 2022)

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kajian yang dilakukan dari tahun 2019 hingga 2024 menunjukkan berbagai upaya yang dilakukan untuk memerangi transaksi ilegal di perbatasan Kalimantan Barat. Salah satu langkah utama adalah kerjasama antara Indonesia dan Malaysia dalam menanggulangi peredaran narkoba. Fokus utama kerjasama ini adalah wilayah perbatasan Entikong-Sarawak, di mana kedua negara berkolaborasi untuk meningkatkan efektivitas dalam menghentikan peredaran narkoba. Penelitian terkait telah dilakukan untuk mengevaluasi bagaimana kerjasama antar pemerintah ini dapat mencapai hasil yang lebih baik. Selain itu, terdapat kerjasama dalam menyelesaikan permasalahan perbatasan yang kompleks. Salah satu contoh konkret adalah penyelesaian masalah perbatasan di Sungai Simantipal. Hal ini dicapai melalui forum bilateral Joint Indonesia-Malaysia Committee (JIM) tentang Demarcation and Survey of International Boundary. Forum ini menghasilkan Memorandum of Understanding (MoU) yang menjadi dasar bagi penyelesaian masalah perbatasan secara damai dan terstruktur.

Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kerjasama dalam mengatasi transaksi ilegal di perbatasan juga menjadi fokus utama. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa kerjasama antara Indonesia dan Malaysia dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghentikan transaksi ilegal. Edukasi dan kampanye publik menjadi alat utama dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai isu ini. Secara keseluruhan, kerjasama antara Indonesia dan Malaysia dalam menangani transaksi ilegal di perbatasan Kalimantan Barat telah menunjukkan hasil yang signifikan. Melalui berbagai inisiatif, seperti penelitian, pengembangan perpustakaan, peningkatan ekonomi, dan edukasi masyarakat, kedua negara berhasil menatasi berbagai tantangan yang dihadapi di perbatasan.

Penelitian yang dilakukan selama periode ini menyoroti pentingnya kerjasama lintas batas dalam mengatasi masalah kompleks seperti perdagangan narkoba dan isu perbatasan. Hasil kerjasama ini menunjukkan bahwa pendekatan multilateral dan kolaboratif dapat memberikan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, kerjasama antara Indonesia dan Malaysia di berbagai bidang telah memberikan dampak positif yang signifikan dalam upaya memerangi transaksi ilegal di perbatasan Kalimantan Barat. Upaya ini tidak hanya memperkuat hubungan bilateral, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kedua negara.

Saran

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia dan Malaysia telah meningkatkan upaya bersama dalam memperkuat pengawasan di perbatasan. Penggunaan teknologi canggih seperti drone, kamera pengintai, dan sistem pemantauan satelit telah menjadi bagian dari strategi pengawasan ini. Dengan teknologi ini, aparat keamanan dapat memantau pergerakan yang mencurigakan di sepanjang perbatasan, mengidentifikasi jalur penyelundupan narkoba, dan melakukan intervensi sebelum barang haram tersebut memasuki wilayah kedua negara. Selain teknologi, pelatihan khusus bagi aparat keamanan juga menjadi prioritas dalam meningkatkan kemampuan mereka untuk menghadapi jaringan narkoba yang semakin kompleks dan canggih.

Tidak hanya fokus pada pengawasan, kerja sama dalam berbagi intelijen antara Indonesia dan Malaysia juga menjadi kunci dalam menanggulangi peredaran narkoba. Kedua negara telah mengembangkan mekanisme berbagi informasi secara real-time, yang memungkinkan pihak berwenang untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang jaringan narkoba internasional. Dengan adanya kolaborasi ini, operasi penegakan hukum dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat sasaran. Selain itu, berbagi intelijen juga membantu dalam mengidentifikasi pelaku utama di balik jaringan narkoba dan mengungkap jalur-jalur distribusi yang digunakan oleh sindikat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, M., & Afrizal, M. (2016). *Kerjasama Internasional dalam Penanggulangan Perdagangan Manusia di Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Badan Narkotika Nasional (BNN). (2023). *Laporan Tahunan Penanganan Narkotika di Perbatasan Kalimantan Barat*. Jakarta: BNN.
- Baruddin, M. (2019). The Role of Malaysia in Combating Transnational Organized Crime in Southeast Asia. In T. H. Lee (Ed.), *Transnational Organized Crime in Southeast Asia* (pp. 129-150). NUS Press.
- BNN RI. (2015). Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Badan Narkotika Nasional RI Indonesia, 175-177.
- Brown, T. (2020). *Border Security and Transnational Crime in Southeast Asia*. New York: Routledge.
- Burchill, S. (2009). *Theories of International Relations*. Palgrave Macmillan, Fourth Edition.
- Chouvy, P. A. (2013). *An Atlas of Trafficking in Southeast Asia: The Illegal Trade in Arms, Drugs, People, Counterfeit Goods and Natural Resources in Mainland Southeast Asia*. I.B. Tauris & Co Ltd.
- Corrapico, H. (2012). Transnational Organized Crime as a Security Concept. In F. Allum & S. Gilmour (Eds.), *Routledge Handbook of Transnational Organized Crime*. New York: Routledge.
- Elfitriani, L., & Waluyo, A. (2018). *Kerjasama Indonesia-Malaysia dalam Penanggulangan Perdagangan Manusia*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Friedman, T. L. (1999). *The Lexus and the Olive Tree: Understanding Globalization*. New York: Picador.
- Ganster, P., & Lorey, D. E. (2005). *Borders and Border Politics in a Globalizing World*. Wilmington: Scholarly Resources Inc.
- Jemadu, A. (2008). *Politik Global dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Jones, L. (2019). *Education and Vulnerability in Border Regions*. Singapore: Springer.
- Kementerian Luar Negeri (Kemlu). (2023). *Laporan Perdagangan Manusia di Perbatasan Kalimantan Barat*. Jakarta: Kemlu.
- Khoirunnisa. (2023). Peran Female Peacekeepers Indonesia dalam Misi Perdamaian United Nations Interim Force In Lebanon (UNIFIL) Tahun 2015-2017. *Global Insight Journal*, Vol 08(No.01), 56–81.
- Khoirunnisa, K. J. D. (2024). Soft Power Strategy: The Role of Indonesia's Diplomacy in the Peace Mission to the RussianUkraine Conflict. *..Papua Journal of Diplomacy and International Relations*, Volume 4(Issue 1), 49–66.
- Khoirunnisa Khoirunnisa. (2023). Exploring the Meaning of Faith and Kufr: Perspectives of Islamic Theological Schools. *Pharos Journal of Theology*, Volume 104(Issue 5), 1–15.
- Martono, N. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

- Muhamad, S. V. (2015). *Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkoba dari Malaysia ke Indonesia: Kasus di Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Prayuda, R. (2019). *Jalur Penyelundupan Narkotika di Kawasan Asia Tenggara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pudjiastuti, R. (2016). *Kejahatan Perdagangan Manusia dan Upaya Penanggulangannya*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Rahman, M. A. (2020). Transnational Crime and the Role of ASEAN in Combating Transnational Organized Crime. *Journal of Southeast Asian Economies*, 38(2), 237-256.
- Saleh, A. (2019). *Kerjasama Indonesia-Malaysia dalam Menanggulangi Transaksi Ilegal di Perbatasan Kalimantan Barat*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Serrano, M. (2002). *Transnational Organized Crime and International Security: Business as Usual?* Lynne Rienner Publishers.
- Slaughter, A. M. (1995). Liberal International Relations Theory and International Economic Law. *American University Journal of International Law and Policy*, 1, 717-743.
- Smith, J. (2021). *Economic Conditions and Illegal Activities in Border Areas*. Kuala Lumpur: University of Malaysia Press.
- Sulistiyanto, S. (2020). Combating Transnational Organized Crime in Southeast Asia: The Role of Indonesia and Malaysia. In T. H. Lee (Ed.), *Transnational Organized Crime in Southeast Asia* (pp. 151-170). NUS Press.
- Sulistiyanto, S. (2021). The Role of Indonesia and Malaysia in Combating Transnational Organized Crime in Southeast Asia: A Comparative Study. In T. H. Lee (Ed.), *Transnational Organized Crime in Southeast Asia* (pp. 193-216). NUS Press.
- Sutanto, A. (2019). The Role of Indonesia and Malaysia in Combating Transnational Organized Crime in Southeast Asia. In T. H. Lee (Ed.), *Transnational Organized Crime in Southeast Asia* (pp. 171-192). NUS Press.
- Tadjbakhsh, S., & Chenoy, A. M. (2007). *Human Security: Concepts and Implications*. New York: Routledge.
- World Bank. (2022). *Economic Development Programs in Southeast Asian Border Regions*. Washington, DC: World Bank.

Dokumen Elektronik

- International Organization for Migration (IOM). (n.d.). *Profil Perdagangan Orang di Daerah Perbatasan Kalimantan*. Retrieved from [\[https://indonesia.iom.int/sites/g/files/tmzbd1491/files/documents/Profil%20Perdagangan%20Orang%20di%20Daerah%20Perbatasan%20Kalimantan.pdf\]](https://indonesia.iom.int/sites/g/files/tmzbd1491/files/documents/Profil%20Perdagangan%20Orang%20di%20Daerah%20Perbatasan%20Kalimantan.pdf)(<https://indonesia.iom.int/sites/g/files/tmzbd1491/files/documents/Profil%20Perdagangan%20Orang%20di%20Daerah%20Perbatasan%20Kalimantan.pdf>)
- Jurmafis UNTAN. (n.d.). *Penanggulangan Peredaran Narkotika di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat* Retrieved from [\[https://jurmafis.untan.ac.id/index.php/publika/article/download/1046/pdf_183\]](https://jurmafis.untan.ac.id/index.php/publika/article/download/1046/pdf_183)(https://jurmafis.untan.ac.id/index.php/publika/article/download/1046/pdf_183)
- KEMHAN. (2022, Agustus 9). *Menhan Prabowo dan Menhan Malaysia Tandatangani Nota Kesepahaman Pertahanan RI – Malaysia*. Retrieved from KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA: <https://www.kemhan.go.id/2022/08/09/menhan-prabowo-dan-menhan-malaysia-tandatangani-nota-kesepahaman-pertahanan-ri-malaysia.html>



- Neliti. (n.d.). Penanggulangan Peredaran Narkotika di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat. Retrieved from https://media.neliti.com/media/publications/10682-ID-penanggulangan-peredaran-narkotika-di-wilayah-perbatasan-kalimantan-barat-indone.pdf
- Unsrat Lex Privatum. (n.d.). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Transaksi Perdagangan Lintas Batas pada Daerah Perbatasan. Retrieved from https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/download/18207/17734